



Wabup Buka Workshop Siskeudes

Dana Besar, Tanggung Jawab Besar

PUTUSSIBAU – Desa yang diberikan dana cukup besar, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pameru, saat membuka Workshop Sistem Keuangan Desa (DPMD) yang digelar BPKP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu, di Indoor Putussibau, Rabu (28/3).

“Para Kades harus transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dalam tata kelola keuangan desa. Semua harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai aturan berlaku,” ujarnya. Dia juga menambahkan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diberikan keleluasaan bagi pemerintah desa menggunakan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Dijelaskan Wabup bahwa BPKP memang berperan menegakkan program strategis pemerintah. Instansi vertikal tersebut, menurut dia, juga telah bekerja sama dengan Kementerian, dalam menghadirkan Siskeudes sebagai solusi bagi keterbatasan



WORKSHOP SISKEUDES: Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pameru SH saat membuka Workshop Sistem Keuangan Desa di Indoor Putussibau, Rabu (28/3).

pengetahuan aparat desa tentang keuangan desa dan keterbatasan fasilitas koneksi internet. “Melalui Siskeudes ini akan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan, sehingga memudahkan desa dan Pemda dalam hal dana desa,” tutur Wabup. Siskeudes, menurut Wabup, sebetul-

nya sudah pernah disosialisasikan DPMD Kabupaten Kapuas Hulu pada 2017 lalu. Sosialisasi itu juga, menurut dia, dengan bekerja sama bersama BPKP Pontianak, dimana hasilnya sudah mampu mengikuti sistem yang ada. “Bagi kades yang belum paham tentang Siskeudes, paham tentang Siskeudes, Badan

perencanaan pembangunan Kabupaten Kalimantan Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu. (aan)

perencanaan pembangunan Kabupaten Kalimantan Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu. (aan)

MUSTA'IN/PONTIANAK POST